

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATENPOHUWATO**

**Oleh :**

**SRI FARNI YANTI LAIDA  
NIM :E1119084**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
TAHUN 2020**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

**SRI FARNI YANTI LAIDA**  
E1119084

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana  
dan telah di setujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal  
Gorontalo, 20 Februari 2020

**PEMBIMBING I**



Nurhidayah, SE., MM  
NIDN : 09 160686 01

**PEMBIMBING II**



Taufik Udango, SE., M.Ak  
NIDN : 09 280888 05

## HALAMAN PERSETUJUAN

### ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO

Oleh

SRI FARNI YANTI LAIDA  
E1119084

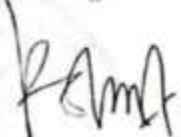
Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)  
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Kartini Muslimin, SE, M.Ak
2. Syamsuddin, SE, Ak, MM
3. Purnama Sari, SE, M.Si
4. Nurhidayah, SE,
5. Taufik Udango, SE, M.Ak

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi  
  
  
Fahri Ghofy, S.Psi, SE., MM  
NIDN : 09 220575 02

Ketua Program Studi Akuntansi

  
Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si  
NIDN : 09 140279 02

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ihsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 20 Februari 2020  
Pernyataan

  
Sri Farni Yanti Laida  
E1119084

## **ABSTRAK**

Sri Farni Yanti Laida. E.1110984. Analisa kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten Pohuwato. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang di ukur dengan menggunakan Rasio keuangan. Penelitian ini menggunakan Rasio Keuangan. Penelitian ini menggunakan analisa Rasio derajat otonomi fiskal. Berdasarkan hasil penelitian dari Rasio Kemandirian dengan hasil tingkat rata-rata sebesar 156,6% menandakan sangat efektif pendapatan Daerah sedangkan Rasio Efisiensi tingkatanya berada pada kriteria efisiensi, yaitu 10,6%. Hal ini mengikasikan bahwa system pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato yang sangat stabil.

**Kata Kunci :** Rasio keuangan, Rasio efektivitas, Rasio efisiensi, kinerja keuangan pemerintah.

## **ABSTRACT**

Sri Farni Yanti Laida. Financial performance analysis in the Regional Government of Pohuwato Regency. The aim of this research is to find out how the financial performance of the local government in the district of Pohuwatoyang is measured using financial ratios. This study uses financial ratios. This study uses a ratio analysis of the degree of fiscal autonomy. Based on the results of the research, the independence ratio with an average level of 156.6% indicates very effective regional income, while the efficiency ratio of the level is in the efficiency criteria, namely 10.6%. This indicates that the regional financial management system by the Pohuwato district government is very stable.

**Keywords:** financial ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, government financial performance

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji hanya milik Allah Tuhan Semesta Alam, yang selalu memberikan kemenangan bagi siapa saja yang berjuang dijalannya. Dalam penulisan proposal ini peneliti berharap dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai penulisan karya ilmiah dan bisa memberikan kontribusi bagi para peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi. Selain itu penyelesaian karya ilmiah ini sebagai prasyarat untuk melakukan penelitian lebih lanjut sekaligus sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi Jurusan akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ichsan Pohuwato.

Dalam penyusunan Skripsi ini tidak lupa pula peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini, adapun tanda trima kasih calon peneliti kepada Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, kasih sayang dan Doa yang tiada henti-hentinya. Ibu Nurhidayah, SE.,MM sebagai pembimbing I dan Bapak Taufik Udango, SE.,M.Ak selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini. Bapak Muhamammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak, selaku ketua yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Gorontalo, Bapak Haris Hasan selaku Ketua STIE Ichsan Pohuwato Bapak Sulaiman SE.,MM pembantu ketua bidang akademik STIE Ichsan Pohuwato. Bapak Agus Baku selaku pembantu ketua II Bidang Kepegawaian sekaligus kemahasiswaan, Serta Seluruh staf Dosen di lingkungan STIE Ichsan Pohuwato serta teman mahasiswa/wi yang telah memberikan dorongan baik moral maupun moril bagi peneliti.

Dalam penyusunan Skripsi ini tentu masih jauh dari kata kesempurnaan, karna kesempurnaan hanyalah dimiliki sang Pencipta, terlepas dari itu semoga peneliti dalam penyusunan ini bisa mendekati kesempurnaan dalam karya ilmiah. Amin.....

Marisa, Oktober 2020

Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan .....	6
1.4 Manfaat.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Akuntansi .....	8
2.2. Pemerintah Daerah .....	9
2.3. Akuntansi Keuangan Daerah.....	11
2.4. Kinerja Keuangan Daerah .....	13
2.5. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) .....	16
2.6. Analisis Rasio Keuangan Daerah .....	18

2.7. Penelitian Terdahulu.....	20
2.7. Kerangka Berpikir .....	21
2.8. Hipotesis .....	22
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1. Objek Penelitian .....	24
3.2. Jenis Sumber data .....	24
3.3. Populasi dan Sampel.....	25
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	25
3.5. Metode analisis Data .....	26
3.6. Definisi Operasional.....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	28
4.1.1. Sejarah Singkat PEMDA Pohuwato .....	28
4.1.2. Visi dan Misi .....	30
4.2. Pembahasan .....	31
4.2.1. Rasio Kemandirian .....	31
4.2.2. Rasio efektifitas .....	33
4.2.3. Rasio Efisiensi .....	35
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>37</b>
5.1. Kesimpulan.....	37
5.2. Saran .....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 4.1 Tingkat kemandirian dan Kemampuan Daerah.....	32
Tabel 4.2 pendapatan Transfer Daerah Kabupaten Daerah.....	32
Tabel 4.3 Rasio Efektivitas.....	34
Tabel 4.4 Rasio Efisiensi.....	35
Tabel 4.5 Rasio Efisiensi .....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	22
------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian.....	42
Lampiran 2 : Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	43
Lmpiran 3 : Laporan Perubahan Saldo Anggaran.....	44
Lampiran 4 : Laporan Operasional. ....	45
Lampiran 5 : Laporan Ekuitas.....	47
Lampiran 6 : Neraca Per 31 Desember 2016 dan 2015 (Audited).....	48
Lampiran 7 : Laporan arus Kas.....	50
Lampiran 8 : Surat Rekomendasi Dari Lokasi Penelitian.....	52
Lampiran 9 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	53
Lampiran 10 : Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi .....	54
Lampiran 7 : Hasil Turniting .....	55
Lampiran 8 : Riwayat Hidup.....	57

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Reformasi pengelolaan keuangan Daerah sendiri diawali dengan adanya tuntutan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Guna mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik. “Reformasi manajemen sektor publik harus dan sangat ditentukan oleh reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah” (Mardiasmo, 2002). Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, selalau dibuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan disetiap akhir periode dan selalu dilakukan pemeriksaan (Audit) oleh BPK untuk menialai kewajaran dalam pengelolaan keuangannya. Setiap Provinsi atau Daerah tidak luput dari pertanggungjawaban setiap akhir periode akuntansi, sehingga dapat diketahui tingkat kemampuan atau kinerja daerah tersebut.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut dapat diukur dari rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Karena menggunakan indikator

keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan (Hidayat dan Ghozali, 2013).

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar bisa dinilai kebenaran dan keandalan dari informasi terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan berjalannya kedua proses tersebut maka diharapkan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah dapat lebih dipertanggungjawabkan (Martani dkk, 2013)

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria dan unsur-unsur yang membentuk kualitas laporan keuangan yang laporan keuangannya mempunyai nilai atau manfaat (Fatma 2017).

Sebagai organisasi sektor publik dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, organisasi atau lembaga pemerintah membutuhkan jasa akuntansi untuk pengawasan dan menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonominya. Dengan adanya akuntansi pemerintahan maka pemerintah harus mempunyai rencana yang matang untuk suatu tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia.

Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Badjuri dan Trihapsari, 2004). Selanjutnya Badjuri dan Trihapsari (2004) mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah (Sukmaningrum 2012).

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, publikasi informasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan para pemakai informasi. Informasi dikatakan bermanfaat jika informasi tersebut mampu dipahami, dapat dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi. (Andriani, 2010).

Pemerintah Daerah berarti sifat khas dari otoritas administratif Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat menggambarkan karakteristik Pemerintah Daerah. Laporan keuangan merupakan suatu alat yang memfasilitasi transparansi akuntabilitas publik, yang menyediakan informasi yang relevan mengenai kegiatan operasionalnya, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan atas pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan tersebut

Hal yang memengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 65 Tahun 2010, SIKD memberi manfaat atau kemudahan dalam mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi

yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Mahaputra dan Putra, 2014).

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Akuntansi pada dasarnya akan menghasilkan sebuah informasi dari pelaksanaan kegiatan dari system akuntansi yang ada di dalam setiap entitas atau organisasi bisnis yang disebut dengan informasi akuntansi yang akan dimanfaatkan oleh pengguna seperti masyarakat umum, masyarakat intelektual (termasuk didalamnya mahasiswa atau peneliti) dan para pengambil keputusan bisnis dalam organisasi.

Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus memper-timbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat. Sesuai UU No. 17 tahun 2003, pada Pasal 31 dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh Kepala Daerah setidaknya meliputi: Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Penggunaan analisis rasio keuangan pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui

bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Pada penelitian sebelumnya yang berada di Dinas Sosial Kabupaten Bintan menjelaskan pencapaian hasil yang sangat efisien dan ekonomis. Namun, tingkat efektivitas program masih kurang sehingga dapat disimpulkan efektivitas dari program – program yang langsung menyentuh masyarakat belum maksimal (Wira 2013). Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis Kinerja dinas Sosial di lihat dari sisi laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Dinas Sosial adalah rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio aktivitas dan rasio DSCR (Halim 2013).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato”*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten pohuwato Provinsi Gorontalo yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan?

## **1.3. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan.

#### **1.4. Manfaat**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Bagi peneliti**

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selama periode yang ditentukan.

##### **2. Bagi PEMDA Pohuwato**

Dapat memberikan sumbangan pikiran didalam menentukan kebijakan pengelolaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

##### **3. Bagi peneliti selanjutnya**

Dapat dijadikan sebagai bahan refrensi dalam peneliti selanjutnya yang ada keterkaitan dengan objek penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Akuntansi**

*American Accounting Association* merupakan lembaga di Amerika Serikat yang bergerak dalam bidang riset, pengembangan serta pengajaran akuntansi. Menurut AAA, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pengguna informasi tersebut. Dalam pengertian ini, akuntansi berfungsi sebagai alat analisa data atau transaksi keuangan yang berguna untuk proses pengambilan keputusan bagi penggunanya.

Akuntansi adalah seni daripada pencatatan, penggolongan dan peringkasan dari pada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian dan setidak-tidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang secepat-cepatnya dan petunjuk atau dinyatakan dengan uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul dari padanya (s. Munawir 2005).

Akuntansi adalah sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya (Harahap 2005).

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah memberikan data-data kuantitatif, utamanya yang memiliki sifat keuangan, dari usaha ekonomi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memiliki alternatif-alternatif dalam suatu keadaan (Baridwan, 2000).

Pada umumnya tujuan [akuntansi](#) pemerintah adalah menyajikan informasi bagi para pengambil keputusan tentang kejadian-kejadian ekonomi yang penting dan mendasar serta membantu mempersiapkan informasi tentang bagaimana cara mereka mengalokasikan sumber-sumber yang serba terbatas seperti modal, tenaga kerja, tanah dan bahan baku guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah

## **2.2. Pemerintah Daerah**

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh [Pemerintah Daerah](#) dan [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](#) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip [otonomi](#) seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip [Negara Kesatuan Republik Indonesia](#) sebagaimana dimaksud dalam [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#). Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](#) (DPRD) dibantu oleh [Perangkat Daerah](#) (Wikipedia).

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan [pemerintahan daerah](#) kepada [Pemerintah](#), dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **2.3. Akuntansi Keuangan Daerah**

Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam [Undang-Undang Dasar 1945](#). Pemerintah daerah adalah [Gubernur](#), [Bupati](#), atau [Wali kota](#), dan [Perangkat Daerah](#) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Wikipedia).

System pencatatan yang dilakukan dalam akuntansi keuangan daerah tidak jauh berbeda dengan pencatatan akuntansi lainnya. Pada dasarnya kita perlu mengidentifikasi transaksi ekonomi, apakah transaksi tersebut bersifat ekonomi atau tidak. Transaksi ekonomi ialah

aktivitas yang ada hubungannya dengan uang. Setelah melakukan pengidentifikasian langkah selanjutnya ialah pengukuran transaksi ekonomi dengan satuan [uang](#), jadi setiap transaksi yang ada harus dinyatakan dalam nilai mata uang yang berlaku (rupiah). Selanjutnya adalah pencatatan transaksi serta pengolahan data menjadi sebuah informasi yang diperlukan. Tentunya setiap pencatatan transaksi harus disertakan dengan dokumen-dokumen dan bukti transaksi yang sah untuk kemudian dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar pembantu. Bukti transaksi pada Sistem Akuntansi Daerah dikategorikan menjadi tiga, yaitu Bukti Penerimaan Kas, Bukti Pengeluaran Kas, dan Bukti Memorial yang kemudian dimasukkan ke Jurnal Umum.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa, Sistem akuntansi pemerintaha pusat diatur dengan peraturan menteri keuangan yang mengacu pada pedoman umum system akuntansi pemerintahan. Sedangkan system akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/ walikota yang mengacu pada pedoman umum system akuntansi pemerintahan. Pedoman umum system akuntansi pemerintahan diatur dengan peraturan menteri keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri dalam negeri.

Menurut Halim dkk (2012:40): Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

Pengertian akuntansi keuangan daerah (akuntansi sektor publik) menurut Indra Bastian (2007:15) adalah “Serangkaian mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada

lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen yang ada di bawahnya seperti PEMDA, BUMD, BUMN, LSM, yayasan sosial serta proyek-proyek kerjasama antara sektor publik dan sektor swasta.”

Sedangkan menurut Abdul Halim (2008:35) akuntansi Keuangan daerah adalah sebagai berikut “Proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah seperti kabupaten, kota atau wilayah provinsi. Hasil informasi keuangan yang dilaporkan tersebut bertujuan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak eksternal”.

#### **2.4. Kinerja Keuangan Daerah**

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan (Hidayat dan Ghozali, 2013).

Kinerja diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan (Kamus Akuntansi Manajemen Kontemporer, 1994). Mardiasmo (2002) mendefinisikan “sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu

sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan non financial”. Menurut Mamesah (Halim 2008: 18-19) keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uanga maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasi atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Bastian (2006), Tujuan Pengukuran Kinerja yaitu sebagai laporan operasi kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk menilai kinerja keuangan organisasi dalam hal efisiensi dan efektifitas serta memonitor biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Bab 1, Pasal 1, Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005). Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan. Keuangan Daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini lebih

difokuskan kepada pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD (Indah Mustika Dewi, 2011).

Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antara daerah dengan yang lainnya, terutama dalam kemampuan keuangan daerah, antara lain (1) Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah. (2) Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah (3) Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan (4) Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah (Natalia, 2001 dalam Kamaroellah, 2017)

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya Halim (2007).

## 2.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD atau Anggarapn Pendapatan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Jika APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah pusat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyusunan APBD disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBN dilakukan oleh otoritas daerah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing wilayah.

Mardiasmo (2002:11) Menggemukakan , Bahwa Salah Satu Aspek Terpenting Dari Suatu Pemerintah Daerah Yang Harus Diatur Dengan Secara Hati-Hati Ialah Masalah Pada Pengelolaan Keuangan Serta Juga Anggaran Daerah. Anggaran Daerah Yang Tercermin Didalam Suatu APBD Merupakan Suatu Instrumen Kebijakan Utama Bagi Suatu Pemerintah Daerah, Yang Menduduki Porsi Sentral Didalam Upaya Pengembangan Kapabilitas Serta Juga Efektivitas Pemerintah Daerah Itu. Anggaran Daerah Itu Seharusnya Digunakan Sebagai Alat Untuk Dapat atau Bisa Menentukan Besarnya Suatu Pendapatan dan juga Belanja, Alat Bantu Suatu Pengambilan Putusan Serta Juga Perencanaan Pembangunan Juga Sebagai Alat Otoritas Pengeluaran Pada Masa Yang Akan Datang Serta Juga Ukuran Standar Untuk Dapat/Bisa Mengevaluasi Kinerja Serta Juga Alat Koordinasi Bagi Seluruh Aktivitas Diberbagai Unit Kerja.

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan [pemerintah daerah](#) di [Indonesia](#) yang disetujui oleh [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](#). APBD ditetapkan dengan [Peraturan Daerah](#). Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Wikipedia)

APBD terdiri atas:

- *Anggaran Pendapatan*, terdiri atas;

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya.
- Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus.
- Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.
- *Anggaran Belanja*, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- *Pembiayaan*, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban

APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut (Pide 2019).

## **2.6. Analisis Rasio Keuangan Daerah**

Analisis rasio keuangan daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Lazyra KS, 2016). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah.

Menurut Suyana Utama (2008), rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim (2007:96) “PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah di harapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri. Menurut Halim (2007: 232) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pusat, Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah (Hamzah, 2008). Kinerja keuangan dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan semakin kecil, sedangkan kinerja dikatakan tidak efisien apabila rasio yang dihasilkan semakin besar. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungut pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Rasio efisiensi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Rasio efektifitas dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio aktifitas, rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat di formulasikan sebagai berikut:

#### 1. Rasio belanja rutin Terhadap APBD

$$RBR = \frac{\text{Belanja Rutin/operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

#### 2. Rasio Belanja Modal terhadap APBD

$$RBM = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

## **2.7. Penelitian Terdahulu**

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam membuat proposal ini sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan kedepan nanti.

Tabel 1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode
1	Kemala Putri Dewi Lubis dan Nurlia Hafni	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013	<i>Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, Kinerja Keuangan</i>	Analisis Rasio Keuangan
2	Lazyra KS	Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai Kinerja keuangan pemerintah kota medan	<i>Rasio Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan</i>	Analisis Rasio Keuangan
3	Wita Liantino	Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan pada kantor badan pendapatan pengelolaan keuangan dan kekayaan aset daerah (bppkad) Di kota Surakarta	Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan Daerah	Deskriptif Kuantitatif

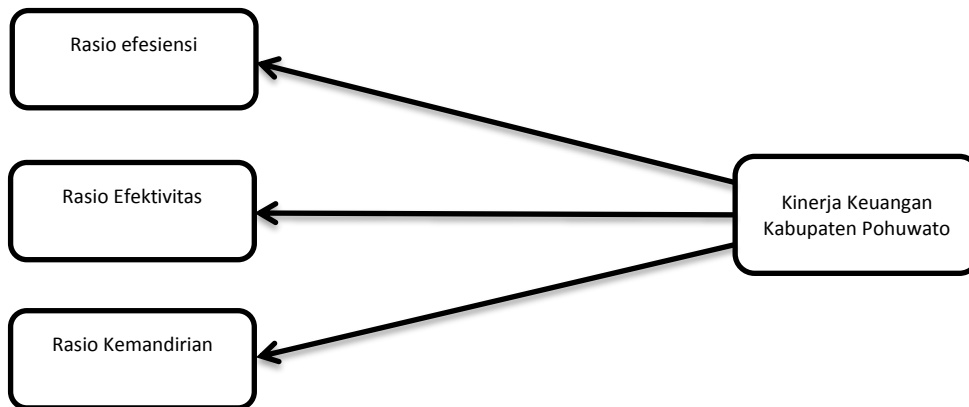
*Tabel Olahan 2019*

## 2.8. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir (Sugiyono, 2010:60)

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan model penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



## 2.9. Hipotesis

Hipotesis ilmiah ialah ketika mencoba untuk mengungkapkan jawaban untuk masalah diselidiki. Hipotesis ini dikonfirmasi ketika semua gejala yang tidak bertentangan dengan hipotesis. Dalam upaya untuk membuktikan hipotesis, peneliti dapat dengan sengaja menyebabkan atau membuat gejala. Musyawarah ini disebut percobaan atau eksperimen. Hipotesis telah diverifikasi disebut teori.

**Menurut Prof. Dr. S. Nasution,** Hipotesis adalah dugaan tentang apa yang kita amati dalam upaya untuk memahaminya. (Nasution:2000). Sedangkan menurut sugiyono (2009), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori.

Berdasarkan landasan teori kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, rumusan hipotesis penelitian yang diajukan peneliti adalah: “ kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah kabupaten belum maksimal dilihat dari sisi laporan keuangan yang dikukur dengan rasio keuangan”.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakuakn pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang berlokasi di Blokplan Kota Marisa yang meliputi data laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Kinerja Keuangan) dari PEMDA Pohuwato Tahun 2016.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).

1. Data Primer yaitu yaitu laporan keuangan yang diperoleh dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017-2018. Serta target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder, data sekunder didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur

buku, artikel ilmiah, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

### **3.3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2003). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan karakteristik dari masing-masing pemerintah provinsi.

Sampel adalah sekelompok atau beberapa bagian dari populasi (Indriantoro dan Supomo, 2003). Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibuat peneliti.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun pengertian teknik pengumpulan data menurut para ahli, salah satunya dijelaskan oleh Sugiyono (2013), yang mengungkapkan bahwa teknik pengambilan data merupakan prioritas utama yang memiliki nilai strategis dalam penelitian, hal ini diungkapkan lantaran tujuan penelitian ialah mendapatkan data-data, baik primer, ataupun data skunder.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan cara Dokumentasi, yaitu melalui pencatatan ataupun *softcopy* atas data-data yang diperlukan dibutuhkan yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Dokumentasi**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pencatatan bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 yang diperlukan oleh peneliti.

## 2. Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Daerah Kab Pohuwato sekaligus meminta laporan keuangan PEMDA dlm Bentuk File.

### 3.5. Metode Analisis Data

Tahap-tahap teknik menganalisis data dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan indikator kinerja keuangan yaitu rasio kemandirian daerah, rasio efektifitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan keuangan daerah. Untuk menganalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan indikator kemampuan keuangan yaitu rasio derajat otonomi fiskal. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dalam menganalisis data. Dalam analisis ini akan digambarkan hal-hal yang berkaitan untuk mengetahui kemampuan keuangan serta kinerja keuangan PEMDA Pohuwato. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan terdiri dari tiga aktifitas :

#### a. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Bantaun Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

#### b. Rasia Efektifitas

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

#### c. Rasio Efesiensi

$$\text{Rasio Efesiensi} = \frac{\text{Biaya yang dipungut untuk menerima PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

### 3.6. Definisi Operasional

1. Kinerja adalah Suatu pencapaian aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan diharapkan akan mendapatkan penghargaan yang layak sesuai dengan hasilnya.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
3. Rasio Keuangan Rasio keuangan merupakan alat analisis yang dibuat dengan menggunakan data – data yang diambil dari [laporan keuangan](#) untuk mendapatkan informasi yang berarti tentang perusahaan. Data yang diambil dari laporan keuangan perusahaan/ organisasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat PEMDA Pohnuato**

Ketika Bumi berputar pada porosnya, maka muncullah waktu dan ruang. Ketika keduanya diguyur oleh sinar matahari, maka menyala lah sumbu sejarah, dan terus menyala, meski tidak ada tempat yang bernama Kabupaten Pohnuato. Sejarah terus berputar ketika kemudian manusia bergulat dengan waktu dan ruang tempatnya hidup. Dan, di jazirah Gorontalo sebelah barat, terjadi sebuah pergulatan unik yang melahirkan apa yang kemudian disebut sebagai Kabupaten Pohnuato.

Pohnuato mulanya adalah harapan. Pada awalnya adalah kebutuhan. Inspirasi mengenai Pohnuato sudah dipikirkan dan dirancang sejak beberapa puluh tahun lalu, dan mengalami puncak pada tahun 1999. Saat itu, kehendak daerah untuk memekarkan diri dalam entitas-entitas yang lebih subtil mendapat angin segar dari Pemerintah Pusat.

Di beberapa kecamatan di ujung barat Gorontalo menjadikan regulasi itu untuk bisa memekarkan diri dari Kabupaten Gorontalo. Boalemo adalah nama pilihan waktu itu. Akhir dari “perjuangan” untuk mewujudkan Boalemo rupanya berakhir dengan ketidakpuasan. Alasan teritorial mengemuka. Tilamuta dianggap tidak merepresentasikan sesuatu yang “tengah”. Pada saat itulah, beberapa warga pun mulai mempersiapkan lahirnya daerah baru yang lebih otonom ; Pohnuato. Kesejahteraan, perdamaian, dan konsensus adalah titik balik dari apa yang telah

diputuskan sebelumnya. Derap langkah pun dipercepat, persiapan administrasi dikebut. Semua untuk satu harapan, satu keyakinan.

Memasuki awal tahun 1990-an, beberapa kali digelar pertemuan yang dilaksanakan di Tilamuta membicarakan pembentukan kabupaten baru. Selanjutnya dilaksanakan kembali pertemuan dengan membahas penetapan kota kabupaten. Seluruh tokoh masyarakat berkumpul mewakili 5 (lima) kecamatan yang ada di wilayah pembantu Bupati Wilayah IV yakni, Paguyaman, Tilamuta, Marisa, Paguat, dan Popayato. Hasil pertemuan ini Marisa dan Popayato memilih ibukota kabupaten berkedudukan di Marisa, sementara Paguyaman dan Tilamuta memilih kota kabupaten berkedudukan di Marisa, yang jadi penentu utama adalah Paguat sehingga istilah yang berkembang pada saat itu adalah “Paguat Kecamatan Penentu.” Paguat memilih kota kabupaten berkedudukan di Marisa. Hal ini didasarkan lokasi Marisa yang berada di tengah-tengah Popayato (batas paling Barat) dan Paguyaman (batas paling Timur). Sementara pertimbangan pemberian nama kabupaten tidak mengalami kendala karena alasan sejarah.

Akhirnya, pada media 2003, Pohnuwo pun kemudian lahir dengan damai, tanpa ada ceceran darah seperti di daerah lain diluar Gorontalo. Pohnuwo disambut dengan suka cita, keringat dan air mata membasahi bumi Pohnu.

#### **4.1.2. Visi dan Misi**

##### **Visi**

Terwujudnya sinergi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Madani”

##### **MISI :**

1. Meningkatkan kapasitas dan sinergi pelayanan publik
2. Meningkatkan koordinasi, perumusan kebijakan dan manajemen pembangunan daerah.
3. Meningkatkan akses informasi pemerintah yang berbasis IT
4. Mewujudkan apratur yang professional dan kompeten dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
5. Meningkatkan sarana dan prasarana secretariat daerah.

.

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Rasio Kemandirian**

Abdul Halim (2012) mengemukakan bahwa kemandirian keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman.

Rasio kemandirian menggambarkan seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah, jadi semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan dan kesadaran masyarakat semakin tinggi terhadap daerah.

Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh besar atau kecilnya Rasio kemandirian, dan juga mengerah digambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya (Pramono, 2014).

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Untuk menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian pemerintah daerah, bisa mengacu pada Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (Pramono;2014), sebagai berikut :

Tabel 4.1: Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0%-25%
Sedang	25%-50%
Rendah	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber : *Kepmendagri No. 690.900.327 /1996*

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Bantaun PP dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun 2016

Tabel 4.1 : Pendapatan Transfer Pusat Daerah Kabupaten pohuwato

Uraian	Tahun 2016
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LRA	704.826.855.692
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	68.150.002.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	15.193.209.547
Bantuan Keuangan	3.613.253.435

*Data Olahan 2019*

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{65.776.932.349,14}{791.783.320.674} \times 100\% = 0,083 \text{ atau } 8,3\%$$

Berdasarkan tabel 3 diatas, nampak bahwa Pemerintah Kabupaten Pohuwato dinilai dari tingkat kemandiriannya 0,083 atau 8,3%. Ini menandakan tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato tahun 2016 di anggap rendah sekali. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kemandirian suatu daerah disebabkan kurang sadarnya masyarakat dalam mebayar pajak, retribusi dan hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban masyarakat kepada daerah.

#### 4.2.2. Rasio Efektifitas

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Pohuwto, Provinsi Gorontalo Fitser Mohune mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga triwulan ketiga belum mencapai 50 persen.

Namun Fitser tetap optimistis jika PAD di tahun 2016 ini akan melebihi target yang sudah mereka tentukan hingga akhir tahun 2016, yakni sebesar **Rp 42 miliar**. "Meskipun hingga saat ini baru Rp16 miliar PAD yang sudah terealisasi, tetapi kami optimistis," ungkapnya, Senin.

Fitser mengatakan, keyakinan akan melebihi target yang sudah ditentukan bukanlah tanpa sebab, karena pada tahun 2015 lalu, PAD Pohuwato bisa mencapai 107 persen. Yakni sesuai data pada tahun 2015 mencapai Rp 44,4 miliar dari Rp 41 miliar target awal. "  
(<https://gorontalo.antaranews.com/>)

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD menunjukan bahwa anggaran PAD Kabupaten Pohuwato dari 2015 dan 2016 mengalami kenaikan. Dengan menggunakan Rasio Efektifitas, Rasio ini akan menggambarkan bagaimana cara pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal, Semakin tinggi presentase dana yang akan dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang tidak digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio itu dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.3 : Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD
2016	65.776.932.349.14	42.000.000.000.00

Data Olahan 2019

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{65.776.932.349.14}{42.000.000.000.00} \times 100\% = 156,6\%$$

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4. di atas dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan Kabupaten Pohuwato pada tahun 2016 sangat efektif, karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 156,6%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Pohuwato sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 156,6%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Pohuwato juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

#### 4.2.3. Rasio Efisiensi

Mardiasmo (2009:132) mengemukakan bahwa efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional yang dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus”

$$\text{Rasio efesiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.4 :Rasio Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90 % -100%	Kurang Efisien
80 % - 90%	Cukup Efisien
60 % - 80%	Efisien
Kurang Dari 60%	Sangat Efisien

Sumber Mardiasmo

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui realisasi total pendapatan daerah Kabupaten Pohuwato tahun 2015 sebesar Rp 48.660.778.152,30, naik menjadi Rp 65.776.932.349.14 pada tahun 2016.

Tabel 4.5 Rasio Efesiensi

Tahun	Realisasi PAD	Biaya Yang Di keluarkan Untuk PAD
2016	65.776.932.349.14	7.000.000.000.00

Data Olahan 2019

$$Rasio\ efesiensi = \frac{7.000.000.000.00}{65.776.932.349.14} \times 100\% = 0,106 = 10,6\%$$

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 6. di atas dapat diketahui bahwa Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato pada tahun 2016 tergolong efisien karena nilai rasionya di bawah 60%%. Total biaya yang dikeluarkan terjadi selisih yang cukup besar dengan pendapatan Asli Daerah

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Rasio Kemandirian**

Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016 dengan hasil tingkat rata-rata sebesar 8,3 %, menggambarkan kinerja masih sangat rendah sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam melaksanakan otonomi daerah

##### **2. Rasio efektifitas**

Kabupaten Pohuwato menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerah pada tahun 2016 dengan perolehan 156,6% menandakan sangat efektivit pendapatan daerah.

##### **3. Rasio Efisiensi**

Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pohuwato senantiasa mengarah pada tingkatan yang sangat efisien. Dimana, pada tahun 2016 tingkatannya berada pada kriteria efisien, yaitu 10,6%. Hal ini mengindikasikan bahwa system pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato sangat stabil.

## **5.2. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pohuwato**

Pemerintah Kabupaten Pohuwato harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Sebenarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Pohuwato mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Potensi tersebut antara lain : di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, industri kreatif hingga perdagangan. Apabila pemerintah Kabupaten Pohuwato mampu memaksimalkan potensi tersebut, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah Kabupaten Pohuwato selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Pohuwato juga seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 1 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 kabupaten saja tetapi lebih luas lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, Prof. Dr. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, M.Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi Mustika Indah, 2011, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*, Skripsi, universitas Diponegoro, Semarang.
- Fatma Dewi Aulia, 2017, *Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- KS Lazyra, 2016, *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*, Skripsi, Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara
- Lasut Marsella, Morasa Jenny, Mawikere M Lidia,,*Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Belanja Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Sesuai Pp No 71 Tahun 2010*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 149-156.
- Mardioasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Budi
- Putri Dewi Lubis Kemala dan Hafni Nurlia, 2017 *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013*, KITABAH: Volume 1. No. 1
- Pide Akhmad, 2019, *Manajemen Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah*, Universitas Muhamadiyah Makassar.
- Pramono Joko. 2014 *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*.Jurna. Vol.7 No.13.

Riduwan. (2012). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono Prof. Dr., metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D, Bandung : Cv. Alfa Beta, 2010

Kamaroellah R. Agoes , 2017, *Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Nuansa, Vol. 14 No.

<https://gorontalo.antaranews.com/berita/26959/pad-pemkab-pohuwato-di-bawah-50-persen>

## JADWAL PENELITIAN

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO  
LAPORAN ARUS KAS  
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Audited)

URAIAN	2016	2015
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah	25.779.757.034,00	7.330.633.505,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.201.268.351,00	4.974.220.240,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.282.031.893,00	2.396.862.797,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.177.840.881,00	15.683.178.518,55
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	704.826.855.802,00	577.893.945.239,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	50.100.000.000,00	60.664.620.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	72.571.721.111,00	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Lainnya	5.975.607.350,00	3.942.836.250,00
Jumlah Arus Kas Masuk	636.712.457.136,00	710.421.789.884,95
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	319.359.276.179,00	264.070.342.875,00
Belanja Barang	14.401.607.000,00	133.482.409.748,00
Belanja Hibah	-	-
Belanja Bantuan Sosial	1.153.157.490,00	23.290.564.500,00
Belanja Tak Terduga	21.042.427.800,00	5.939.487.000,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	643.958.203,00	666.478.100,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Lainnya	680.646.300,00	851.908.750,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	122.028.002.100,00	78.081.389.900,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	670.892.860,00	668.778.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	810.389.418.517,00	642.840.818.871,00
Jumlah Arus Kas Keluar	216.723.038.613,00	187.880.951.933,56
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>		
Arus Kas Masuk		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	543.314.000,00	114.799.400,00
Jumlah Arus Kas Masuk	543.314.000,00	114.799.400,00
Arus Kas Keluar		
Belanja Tanah	8.272.349.407,00	2.565.048.954,00
Belanja Peralatan dan Mesin	38.084.021.162,00	28.068.403.520,00
Belanja Bangunan dan Gedung	41.072.020.594,00	52.768.453.739,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	88.607.271.312,00	60.266.101.589,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.585.683.380,00	1.907.038.200,00
Jumlah Arus Kas Keluar	168.611.745.835,00	175.578.046.982,99
(168.068.431.835,00)		(175.460.247.582,00)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Pembayaran Pihak Utang	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	7.000.000.000,00	3.000.000.000,00
(7.000.000.000,00)		(3.000.000.000,00)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
<b>Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris</b>		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	48.935.945.233,00	48.931.079.672,00
So Awal Dana Kapitasi	-	1.056.928.604,00
Jumlah Arus Kas Masuk	48.935.945.233,00	49.988.008.276,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	48.935.945.233,00	48.931.079.672,00
So Akhir Dana Kapitasi	-	2.593.903.560,00

No	URAIAN	2016	2015
1	2	4	5
	<b>ASET TETAP</b>		
	Tanah	90.957.103.113,04	68.438.584.516,10
	Peralatan dan Mesin	245.894.056.626,00	222.190.835.982,00
	Gedung dan Bangunan	422.389.407.421,34	384.575.890.800,84
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	812.722.110.962,10	715.066.545.414,10
	Aset Tetap Lainnya	42.522.105.720,00	37.097.897.049,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	19.856.595.285,00	17.026.060.336,00
	Akumulasi Penyusutan	(706.891.926.674,90)	(613.452.449.342,90)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>936.452.144.452,58</b>	<b>630.833.164.856,84</b>
	<b>DANA CADANGAN</b>		
	Dana Cadangan	0,00	0,00
	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ASET LAINNYA</b>		
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.671.725.051,25	1.693.990.229,58
	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
	Aset Tidak Berwujud	1.191.523.000,00	0,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(15.250.000,00)	
	Aset Lain-lain	84.086.191.643,30	41.372.013.837,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(9.107.634.059,00)	
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>77.826.556.435,55</b>	<b>43.066.004.066,58</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.146.957.124.324,42</b>	<b>954.929.638.354,44</b>
	<b>KEWAJIBAN</b>		
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	27.555.176,00
	Utang Bunga	0,00	0,00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	141.916.667,20	200.416.667,00
	Utang Beban	700.634.126,00	0,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.815.114.969,68	5.819.137.466,16
	Utang Kepada Pihak Ketiga	7.897.164.951,40	4.171.500.045,40
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>11.360.130.724,28</b>	<b>10.218.609.354,56</b>
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
	Utang Dalam Negari	0,00	0,00
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>11.360.130.724,28</b>	<b>10.218.609.354,56</b>
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.135.596.693.000,14</b>	<b>944.711.028.999,88</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1.146.957.124.324,42</b>	<b>954.929.638.354,44</b>

Mariak, Mei 2017  
BUPATI POMALAYATO.



SYARIF MUBUNGA

URAIAN	2016	2015
Jumlah Arus Kas Keluar	46.935.945.233,00	61.524.983.232,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>		<b>(1.536.974.966,00)</b>
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	21.654.606.778,00	(12.116.271.504,44)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan	39.711.255.472,25	51.613.793.619,69
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan	61.365.862.250,25	39.697.522.115,25
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	5.701.787.214,16	4.891.257.857,98
Kas Di Bendahara Dana Kapitasi	1.162.718.310,00	2.649.800.741,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		6.264.407,00
Kas di Bendahara Penerimaan		4.466.950,00
Kas Lainnya		
Kas Di Bendahara Dana BOS	198.241.261,20	127.468.525,00
Saldo Akhir Kas	88.448.609.836,61	47.373.682.366,23

Marsa, Mei 2017  
BUPATI POHUWATO.

SYARIF MBUNGA



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2015 (Audited)

No.	URAIAN	2016	2015
1	2	4	5
	<b>ASET</b>		
	<b>ASET LANCAR</b>		
	Kas di Kas Daerah	81.365.862.250,25	39.697.522.115,25
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	8.488.950,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	5.264.407,00
	Kas di BLUD	5.701.787.214,18	4.891.257.657,98
	Kas Di Bendahara Dana Kapitasi JKN	1.182.718.310,00	2.643.500.741,00
	Kas Di Bendahara Dana BOS	198.241.981,20	127.468.525,00
	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
	Piutang Pajak	4.604.371.252,29	3.280.172.521,29
	Penyisihan Piutang Pajak	(452.930.531,93)	(2.292.986.393,95)
	Piutang Pajak Netto	4.151.440.720,36	987.186.127,34
	Piutang Retribusi	566.444.175,00	2.779.895.763,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(7.921.218,36)	(267.127.332,00)
	Piutang Retribusi Netto	558.523.956,62	2.482.768.431,00
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.877.418.663,00	0,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(510.362.577,75)	0,00
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	3.367.056.085,25	0,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak	732.127.496,00	3.410.639.098,00
	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak	(3.680.637,48)	0,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Netto	728.446.858,52	3.410.639.098,00
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	1.166.171.135,00	0,00
	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(5.830.819,00)	0,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Netto	1.160.340.776,00	0,00
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.160.458.135,91	1.368.190.867,24
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(234.003.013,42)	(8.846.891,00)
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto	1.926.455.122,49	1.361.343.976,24
	Piutang Lainnya	80.000.000,00	85.000.000,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	(80.000.000,00)	(45.200.000,00)
	Piutang Lainnya Netto	0,00	39.800.000,00
	Denda Pajak	1.407.514.499,94	1.125.549.768,60
	Penyisihan Denda Pajak	(186.021.914,57)	(138.440.637,67)
	Denda Pajak Netto	1.221.492.585,37	989.109.130,93
	Denda Piutang Lainnya	7.300.000,00	7.300.000,00
	Penyisihan Denda Piutang Lainnya	(730.000,00)	(36.500,00)
	Denda Piutang Lainnya Netto	6.570.000,00	7.263.500,00
	Beban Dibayar Dimuka	3.750.000,00	22.729.157,00
	Persediaan	8.897.846.139,67	3.679.431.885,21
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>90.470.549.639,91</b>	<b>60.353.763.701,95</b>
	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
	Investasi Non Permanen Lainnya	2.767.500.000,00	2.787.500.000,00
	Penyisihan Investasi Non Permanen	(2.225.224.983,00)	(2.445.767.292,00)
	<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>542.275.017,00</b>	<b>321.732.708,00</b>
	Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	41.665.498.714,38	20.254.983.020,97
	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
	<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>41.665.498.714,38</b>	<b>20.254.983.020,97</b>
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>42.207.773.731,38</b>	<b>20.576.715.728,97</b>



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 (Audited)

URAIAN	AUDITED 2016	
EKUITAS AWAL	944.711.028.999,88	853.370.911.36
SURPLUS/DEFISIT/LC	144.703.407.004,00	81.000.000.000,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	696.111.197,39	
Selisih Revaluasi Aset Tetap		(364.627.518,49)
Koreksi ekuitas lainnya	45.485.085.718,79	
EKUITAS AKHIR	1.135.596.693.600,14	944.711.028.999,88

Marisa, Mei 2017

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

NO URUT	URAIAN	SALDO 2016	SALDO 2015	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
9 3 3	Defisit dan Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	466.358.583,00	-	466.358.583,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	144.704.467.684,08	82.204.706.626,01	62.499.761.058,07	76,03
POS LUAR BIASA					
9 5 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	-	-	-	-
9 4 1	Beban Luar Biasa	-	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	-	(500.000.000,00)	500.000.000,00	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	144.704.467.684,08	81.704.706.626,01	62.999.761.058,07	

Mariso, Mei 2017

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 (A. dited)

NO URUT	URAIAN	SALDO 2016	SALDO 2015	(NAIKKAN/ TURUNKAN)	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
8	PENDAPATAN - LO	922.915.701.898,14	787.964.999.013,30	134.950.702.884,84	21,78
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	65.778.932.345,14	48.680.778.152,30	17.118.154.196,84	35,17
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	27.103.955.705,00	8.365.484.633,00	28.727.471.132,00	325,73
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.547.774.925,80	4.358.384.250,00	(2.810.609.324,20)	(11,89)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengalihan Kepemilikan Daerah yang Dipisahkan-LO	1.287.031.893,00	4.099.162.797,00	(2.812.130.904,00)	(68,48)
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	31.643.170.105,34	35.266.756.432,30	(3.623.586.326,96)	(14,28)
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	791.783.320.674,00	699.608.519.813,00	92.174.801.061,00	13,18
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	704.828.658.082,00	577.693.945.230,00	127.132.915.453,00	22,01
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	18.150.002.000,00	80.864.650.000,00	(62.714.648.000,00)	(15,72)
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	15.193.209.547,00	15.427.370.289,00	(234.160.732,00)	(1,52)
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	3.813.253.435,00	25.622.554.075,00	(21.809.300.640,00)	(65,90)
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	65.358.448.075,00	9.695.701.348,00	55.662.746.727,00	574,07
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	31.086.331.528,00	3.642.830.250,00	27.443.501.278,00	687,92
8.3.2	Dana Darurat - LO	-	-	-	-
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	34.272.117.548,00	5.752.864.968,00	28.519.252.580,00	496,04
9	BEBAN	778.877.692.797,06	675.760.282.387,19	103.117.300.409,77	15,23
9.1.1	Beban Pegawai - LO	322.438.824.377,52	300.425.187.303,00	22.013.636.874,52	7,33
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	183.409.418.165,53	163.525.807.032,78	19.883.611.132,75	12,16
9.1.3	Beban Bunga	-	-	-	-
9.1.4	Beban Subsidi	-	-	-	-
9.1.5	Beban Hibah	11.984.942.400,00	23.295.564.500,00	(11.310.622.100,00)	(48,55)
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	21.642.427.600,00	5.939.487.000,00	15.702.940.600,00	254,28
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	113.956.895.482,00	89.658.450.918,10	24.298.445.563,90	14,34
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	620.727.524,01	1.040.220.441,41	(419.492.917,40)	(40,33)
9.1.9	Beban Lain-lain	885.345.364,00	1.615.040.238,00	(729.694.874,00)	(45,18)
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	743.556.203,00	658.478.102,00	84.880.101,00	12,89
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	690.946.300,00	851.508.750,00	(160.562.450,00)	(18,89)
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	122.028.062.100,00	78.061.389.902,00	43.946.662.198,00	58,28
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	876.692.880,00	658.778.000,00	217.914.880,00	33,08
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>144.238.109.101,08</b>	<b>82.204.706.625,01</b>	<b>62.033.402.475,07</b>	<b>75,46</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
9.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	482.674.000,00	-	482.674.000,00	-
9.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
9.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	16.315.417,00	-	16.315.417,00	-
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Audited)

URAIAN	AUDITED 2016	2015
Saldo Anggaran Lebih Awal	47.182.683.333,23	54.840.000.780,41
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	47.182.683.333,23	54.840.000.780,41
Sub Total	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	68.196.330.172,43	47.182.683.333,23
Sub Total	68.196.330.172,43	47.182.683.333,23
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	68.196.330.172,43	47.182.683.333,23

Marisa, Mei 2017

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUंगा

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMPI)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

No. 18107/PIP/LEMPI-UNISAN/XI/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal skripsi, kepada

Nama Mahasiswa : Sri Fanni Yanti Laida  
NIM : E1119084  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Lokasi Penelitian : Pemda Kabupaten Pohuwato  
Judul penelitian : Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih



Gorontalo, 04 November 2019

Ketua

Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NO. 84/D/O/2001  
Jl. Raden Saleh No. 17 Telp. (0435) 825975 Fax (0435) 825976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
No. 646/UNISAN-G/SR-BP/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

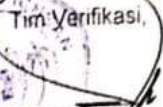
Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Sri Farni Yanti Iaida  
NIM : E11.19.084  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten  
Pohuwato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 30%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 18 Februari 2020  
Tim Verifikasi,  
  
**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Sri Parni Yanti Laida 8.docx  
 Sep 6, 2020  
 4502 words / 35904 characters

Sri Parni Yanti Laida8

## Sri Parni Yanti Laida 8.docx

### Sources Overview

30%

OVERALL SIMILARITY

1	www.scribd.com	7%
2	es.scribd.com	4%
3	repository.radenintan.ac.id	3%
4	id.123dok.com	2%
5	pt.scribd.com	2%
6	edoc.pub	2%
7	gorontalo.antaranews.com	2%
8	eprints.unis.ac.id	1%
9	anzdoc.com	1%
10	repository.uinjkt.ac.id	1%
11	www.timesindonesia.co.id	<1%
12	media.neliti.com	<1%
13	ejournal.uigm.ac.id	<1%
14	accounting.binus.ac.id	<1%
15	eprints.umm.ac.id	<1%
16	www.coursehero.com	<1%
17	Angelina Peleau, Grace B. Nangol, Natalia Y. T. Gerungai. 'ANALISIS PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOL...	<1%
18	kuliahpendidikan.com	<1%

**Excluded search repositories:**

- None

**Excluded from Similarity Report:**

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 25 words)

**Excluded sources:**

- None



# CURRICULUM VITAE

## 1. Identitas Pribadi



Nama : Sri Farnin Yanti Laida  
Nim : E111.9084  
Tempat/tgl Lahir : Wonggarasibarat, 10 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Angkatan : 2016  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Wonggarasi Barat  
Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato

## 2. Riwayat Pendidikan

### a. Pendidikan Formal

1. Menyelesaikan belajar di SD Wonggarasi Barat Kabupaten Pohuwato pada tahun 2010
2. Kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di SMP Negeri 1 Lemito Kab. Pohuwato 2013
3. Selanjutnya Menyelesaikan belajar di SMA Negeri 1 Lemito, pada tahun 2016
4. Melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas ICSN Gorontalo, mengambil jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi
5. Mengikuti Kuliah Kerja Lapangan pengabdian Technopreneur (KKLP Technopreneur) di Desa Mekarti Jaya, kec. Taluditi, Kab. Pohuwato pada tahun 2019